

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama media.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana
- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: sinar Grafika.
- Eny Kusdarini. 2011. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Pers.
- H. A. Tabrani Rusyan. 2018. *Membangun Kepala desa Teladan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- H. Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah, 2022, penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel, Yogyakarta : mirra Buana Media.
- Irwansyah. 2022. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J. Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, Terj. M. Khozim, 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mardiasmo, 2001, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ketujuh. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutaryono, 2015. *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelanjaran Kec. Samigaluh Kabupaten Kulnprogo*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrifuddin Nawi, 2014, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Makassar: CV. Fharras Jaya Grafika.

## **Skripsi**

Bachtiar Rifa'i. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) Ikan dalam Program Pengembangan Labsote Pemberdayaan Desa Kedung Rajo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Alirlangga.

## **Jurnal**

Ika lenaini, 2021, *Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling, jurnal kajian, penelitian & pengembangan Pendidikan Sejarah*, volume 6 nomor 1, universitas islam negeri raden fatah Palembang, Palembang.

Nanang Zulkarnaen, 2018, *Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun tentang Desa*, Civicus, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol.6 Nomor 1.

Yulia Dan Eko, 2017, *Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Volume 2 No 2, Universitas Negeri Semarang.

Muhammad Zulfan Hakim, 2017, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. *Jurnal Hukum Islah*, (29).

## **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian Atau Lembaga Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Ctk.Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, Hlm.1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **Internet**

Muhammad Taufiqqurahman, 2019 "Duh! Kades Di Gowa Tilap Dana Desa Senilai Rp 500 Juta". Detiknews, Edisi Tanggal 02 April 2019. dari <https://news.detik.com/berita/d-4493489/duh-kades-di-gowa-tilap-dana-desa-senilai-rp-500-juta>.

- Anonim. 2021. "Polres Gowa Tahan Mantan Kepala Desa Karena Diduga Korupsi ADD" Antaranews, Edisi Tanggal 10 Agustus 2021. dari <https://makassar.antaranews.com/amp/berita/286638/polres-gowa-tahan-mantan-kepala-desa-karena-diduga-korupsi-add>.
- Idris Tajannnang, 2023, "Datangi Kejari, 29 dari 121 Kepala Desa di Gowa Kembalikan Uang Korupsi Pemberian Rekanan Pengadaan Truk Sampah, Tvonenews, Edisi Tanggal 14 Februari 2023. dari <https://www.Tvonenews.Com/Amp/Daerah/Sulawesi/100565Datangi-Kejari-29-Dari-121-Kepala-Desa-Di-Gowa-Kembalikan-Uang-Korupsi-Pemberian-Rekanan-Pengadaan-Truk-Sampah>.
- Rilis Resmi Hukumonline.Com "Pakta Integritas Antikorupsi Masih Sebatas Formalitas" dapat dilihat dalam Web Resmi Hukumonline.Com <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakta-integritas-antikorupsi-masih-sebatas-formalitas-lt4b1380e9ca639/>
- Rilis Resmi Hukumonline.Com "3 Produk Asal-Usul Munculnya Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tipikor" dapat dilihat dalam Web Resmi Hukumonline.Com <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-produk-hukum-asal-usul-munculnya-pasal-2-dan-3-uu-pemberantasan-tipikor-lt6736bd79b6946/?page=1>